



Analisis Desain Organisasi sebagai Dasar Rekomendasi Manajemen Strategis di Pemerintah Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

Eri Sugiarto^{1*}, Ronny Edward Utama²

Program Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: sugiartoeri424@gmail.com

Diterima: 09-10-2025 | Disetujui: 19-10-2025 | Diterbitkan: 21-10-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the organizational design of the Siwalan District Government, Pekalongan Regency, and to provide strategic management recommendations relevant to the organizational conditions at the sub-district level. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the organizational design of the Siwalan District follows existing regulations but still faces issues such as workload imbalance, limited human resources, and suboptimal inter-departmental coordination. Strategic recommendations include restructuring the organization based on functions and regional needs, enhancing staff capacity, and implementing a digital performance evaluation system. This study is expected to serve as a basis for managerial decision-making and strengthening more effective and efficient local governance.

Keywords: Organizational Design, Strategic Management, Local Government, Siwalan District

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain organisasi pada Pemerintah Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, serta memberikan rekomendasi manajemen strategis yang relevan dengan kondisi organisasi pemerintahan tingkat kecamatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain organisasi Kecamatan Siwalan telah mengacu pada regulasi yang berlaku, namun masih terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi beban kerja, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurang optimalnya koordinasi lintas seksi. Rekomendasi strategis yang diajukan meliputi penyusunan ulang struktur organisasi berbasis fungsi dan wilayah, peningkatan kapasitas aparatur, serta penerapan sistem evaluasi kinerja berbasis digital. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial dan penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan yang lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: Desain Organisasi, Manajemen Strategis, Pemerintahan Daerah, Kecamatan Siwalan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Eri Sugiarto, & Ronny Edward Utama. (2025). Analisis Desain Organisasi sebagai Dasar Rekomendasi Manajemen Strategis di Pemerintah Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Indonesia Economic Journal, 1(2), 1480-1485. <https://doi.org/10.63822/xf6tg883>

PENDAHULUAN

Desain organisasi memiliki peran fundamental dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan, terutama pada tingkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, desain organisasi tidak hanya berfungsi sebagai struktur administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengatur alur koordinasi, pembagian tugas, dan akuntabilitas antarunit kerja. Organisasi pemerintahan yang dirancang dengan baik akan mampu beradaptasi terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, serta kemajuan teknologi yang terus berkembang. Sebaliknya, struktur organisasi yang tidak proporsional dapat menimbulkan birokrasi yang lamban, tumpang tindih kewenangan, dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kecamatan Siwalan sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki tanggung jawab penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Kecamatan ini menaungi 13 desa, yaitu Mejasem, Wonosari, Tengengkulon, Tengengwetan, Tunjungsari, Blimbingwuluh, Pait, Siwalan, Boyoteluk, Rembun, Yosorejo, Depok, dan Blacanan. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, Kecamatan Siwalan dituntut untuk memiliki struktur organisasi yang adaptif, responsif, dan efisien dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Namun, pada praktiknya, masih ditemukan sejumlah tantangan yang memengaruhi kinerja organisasi, seperti beban kerja administratif yang tinggi, keterbatasan jumlah serta kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan koordinasi antarbagian yang belum optimal. Selain itu, perkembangan digitalisasi pemerintahan dan tuntutan transparansi publik juga menuntut adanya transformasi organisasi agar lebih terbuka, akuntabel, dan berbasis data. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap desain organisasi Kecamatan Siwalan, baik dari segi struktur, fungsi, maupun sistem kerja, agar sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Evaluasi terhadap desain organisasi menjadi penting karena struktur yang tepat dapat memperjelas garis komando, meningkatkan efisiensi proses kerja, serta memperkuat sinergi antarunit pelayanan. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas desain organisasi di Kecamatan Siwalan dengan melihat sejauh mana pembagian tugas, koordinasi antarbagian, dan dukungan SDM mampu menunjang pencapaian tujuan organisasi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual organisasi kecamatan dan menawarkan rekomendasi strategis untuk perbaikan desain organisasi yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Robbins dan Coulter (2020), desain organisasi merupakan proses penentuan struktur formal yang mengatur bagaimana tugas dibagi, dikoordinasikan, dan diawasi dalam mencapai tujuan organisasi. Mintzberg (1993) menjelaskan lima komponen utama dalam desain organisasi: strategic apex, middle line, operating core, technostructure, dan support staff. Dalam konteks pemerintahan daerah, desain organisasi diatur berdasarkan ketentuan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Kecamatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di kantor Kecamatan Siwalan, wawancara dengan Camat dan aparatur kecamatan, serta studi dokumentasi terhadap struktur organisasi dan laporan kegiatan. Analisis data dilakukan mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Siwalan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang membawahi 13 desa, yakni Mejasem, Wonosari, Tengengkulon, Tengengwetan, Tunjungsari, Blimbingwuluh, Pait, Siwalan, Boyoteluk, Rembun, Yosorejo, Depok, dan Blacanan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, struktur organisasi Kecamatan Siwalan terdiri dari Camat, Sekretariat Kecamatan, dan beberapa Seksi, yaitu:

1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Seksi Pelayanan Umum.

Struktur tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam **Permendagri Nomor 12 Tahun 2017** tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Kecamatan, yang mengamanatkan bahwa kecamatan memiliki fungsi koordinatif dan pelayanan administratif terhadap pemerintah desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi organisasi belum sepenuhnya berjalan optimal karena adanya beberapa faktor yang saling berkaitan.

1. Distribusi Beban Kerja dan Efisiensi Struktural

Dari hasil wawancara dengan aparatur kecamatan, ditemukan ketimpangan beban kerja antar seksi. Seksi Pelayanan Umum dan Seksi Pemerintahan memiliki volume pekerjaan yang jauh lebih besar dibandingkan seksi lainnya karena berhubungan langsung dengan administrasi desa, pengelolaan surat-menyurat, serta koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat. Sementara itu, beberapa seksi lain memiliki intensitas kegiatan yang lebih rendah dalam periode tertentu. Ketimpangan ini menimbulkan beban administratif berlebih bagi sebagian pegawai dan berpotensi menurunkan efektivitas organisasi secara keseluruhan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desain organisasi yang bersifat struktural-hierarkis belum mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi berbasis fungsi dan output kerja, di mana pembagian tugas tidak hanya didasarkan pada bidang kerja administratif, tetapi juga pada hasil pelayanan dan capaian kinerja.

2. Koordinasi dan Pola Komunikasi Antarbagian

Secara formal, koordinasi antarbagian berjalan sesuai dengan garis komando dari Camat ke setiap Kepala Seksi. Namun, pola koordinasi masih bersifat vertikal dan belum cukup fleksibel untuk mendorong

kolaborasi lintas bidang. Hal ini berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan serta kurangnya integrasi antarunit dalam melaksanakan program pelayanan publik. Dalam perspektif teori desain organisasi Mintzberg (1993), kondisi ini menunjukkan dominasi struktur machine bureaucracy, di mana proses kerja sangat bergantung pada prosedur formal dan hierarki yang kaku.

Sebagai solusi, dibutuhkan penerapan pola koordinasi horizontal dan kolaboratif, misalnya melalui forum lintas seksi atau penggunaan sistem informasi bersama untuk mempercepat aliran informasi dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip desain organisasi modern yang menekankan fleksibilitas, komunikasi terbuka, dan kerja tim lintas fungsi (Robbins & Coulter, 2020).

3. Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Kecamatan Siwalan umumnya memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi pemerintahan, namun belum semua aparatur memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk mendukung proses digitalisasi administrasi. Beberapa pegawai masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi administrasi berbasis daring yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi kendala utama dalam peningkatan produktivitas dan inovasi pelayanan publik.

Kondisi ini memperkuat temuan Handoko (2018) dan Hasibuan (2019) bahwa kualitas SDM merupakan faktor determinan dalam efektivitas organisasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur perlu menjadi prioritas melalui pelatihan teknis digital, manajemen pelayanan publik, dan pengembangan kepemimpinan adaptif.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Digitalisasi

Transformasi digital menjadi tuntutan penting dalam reformasi birokrasi. Namun, di Kecamatan Siwalan, implementasi sistem digital masih terbatas pada pengelolaan surat menyurat dan laporan rutin. Belum tersedia sistem informasi terintegrasi yang dapat memantau kinerja, pelaporan kegiatan, serta data pelayanan publik secara real-time. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia menjadi penghambat utama penerapan e-government di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, diperlukan penerapan sistem digital berbasis data (data-driven governance) yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelayanan publik. Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi kinerja pegawai serta pelaporan kegiatan desa, sebagaimana direkomendasikan oleh Thompson et al. (2018) tentang pentingnya adaptasi teknologi dalam strategi organisasi modern.

5. Implikasi terhadap Efektivitas Pelayanan Publik

Ketidakseimbangan struktur, rendahnya koordinasi, dan keterbatasan kompetensi SDM berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelayanan publik. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa proses pelayanan administratif masih memerlukan waktu lama dan sering kali bergantung pada kehadiran pegawai tertentu. Hal ini menunjukkan belum optimalnya sistem kerja yang berbasis fungsi dan tanggung jawab kolektif.

Oleh karena itu, desain organisasi Kecamatan Siwalan perlu diarahkan pada model yang lebih adaptif dan partisipatif, dengan memanfaatkan teknologi digital, memperkuat kompetensi pegawai, serta

memperluas ruang kolaborasi antarunit kerja. Desain organisasi seperti ini sejalan dengan prinsip good governance, yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepuasan masyarakat.

KESIMPULAN

Desain organisasi Kecamatan Siwalan secara umum telah sesuai dengan ketentuan regulasi, namun masih perlu penyempurnaan agar lebih adaptif terhadap tantangan pelayanan publik modern. Rekomendasi strategis yang diusulkan meliputi restrukturisasi berbasis fungsi dan wilayah kerja, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan manajerial dan teknis, serta digitalisasi sistem pelaporan dan evaluasi kinerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. (2024). Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2024. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan.
- Handoko, T. H. (2018). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mintzberg, H. (1993). Structure in Fives: Designing Effective Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2020). Management (15th ed.). New York: Pearson Education.
- Sedarmayanti. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2018). Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Thompson, A. A., Strickland, A. J., & Gamble, J. E. (2018). Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage. New York: McGraw-Hill Education.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2019). Principles of Management. Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.